

KEPEMIMPINAN PANGERAN DIPONEGORO DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Djoko Surjo*)

"All the world's a stage
And all the men and women
mereley players :
They have their exits and their en-
trances;
And one man in his time plays
many parts".
Sumber : Shakespeare's *As You
Like It*

1. Pendahuluan

Dengan mengutip bagian puisi karya Shakespeare dalam *As You Like It* seperti tertera di atas, tulisan ini bermaksud menyoroti segi kepemimpinan Pangeran Diponegoro dari perspektif sejarah. Dari untaian kata yang penuh makna tersebut di atas, dapat ditangkap bahwa Shakespeare hendak menggambarkan proses kehidupan di dunia ini sebagai panggung (*stage*) sandiwara, yang para pemainnya tidak lain adalah manusia sendiri. Secara silih berganti para pemain naik ke panggung untuk memainkan peranannya masing-masing, (sudah barang tentu harus) sesuai dengan naskah (*script*), perintah (*order*), kemampuan interpretasi dan apresiasi terhadap lakon yang harus dimainkan. Analog dengan panggung teater di atas, maka manusia dalam proses sejarah dapat digambarkan sebagai pelaku (*actor*) sejarah yang secara dinamis memainkan peranannya masing-masing ("taking-role") sesuai dengan kedudukan (*position/status*) yang dimilikinya dalam lingkungan sosio-kultural dan ikatan spatial dan temporal masing-masing.

*)Makalah disampaikan pada *Seminar Sehari Sejarah Pangeran Diponegoro*, yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro di Semarang, pada tanggal 20 Februari 1990.

Berangkat dari metapora Shakespeare di atas, maka pembahasan tentang kepemimpinan dan kepahlawanan tokoh Pangeran Diponegoro akan dipusatkan pada persoalan yang menyangkut tentang kedudukan dan peranan Diponegoro dalam panggung sejarah masyarakat Indonesia. Dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana dan mengapa Diponegoro memiliki tempat penting dalam sejarah. Sejarah Indonesia akan mengantar kedudukan dan perannya dalam sejarah dan masyarakat Indonesia. Pertanyaan itu sekaligus juga akan mengarahkan penjelasan tentang masalah kepahlawanan dan kepemimpinan Diponegoro.

Untuk menjawab pertanyaan di atas diperlukan wawasan pendekatan sejarah yang komprehensif, yang dapat memberikan landasan interpretasi kritis terhadap tokoh Diponegoro dalam proses sejarah. Dalam hubungan itu maka perlu diperhatikan segi-segi berikut. Pertama, tokoh Diponegoro perlu ditempatkan dalam perspektif sejarah yang berwawasan nasion Indonesia sebagai pusat (*Indonesia-centrism*). Kedua, Diponegoro perlu ditempatkan dalam struktur dan interaksi sosio-kultural dari jamannya. Ketiga, tokoh Diponegoro perlu dipandang sebagai tokoh simbolis yang mengambil peran penting (*"role-taking"*) dalam proses interaksi simbolis (*symbolic interaction*) dari masyarakat pendukungnya dalam menghadapi kekuatan-kekuatan indogen dan eksogen.

Diponegoro perlu ditempatkan dalam perspektif nasion, yang dimaksud adalah penempatan tokoh Diponegoro dalam wawasan sejarah yang mengacu pada proses integrasi nasion Indonesia. Wawasan sejarah semacam itu akan dapat membantu dalam menjelaskan dua masalah pokok. Pertama, yaitu masalah makna peristiwa sejarah (*Historical events*) yang melibatkan pelaku sejarah (*historical actors*), dan kedua, yaitu masalah pelaku sejarahnya, di sini yaitu Diponegoro. Yang pertama, menyangkut penjelasan yang berkaitan dengan makna peristiwa *Perang Diponegoro* atau "*Perang Jawa*" (*Java-Oorlog* atau *Java-War*) pada tahun 1825 — 1830, dalam proses sejarah pembentukan kesatuan nasion Indonesia. Yang kedua, maksudnya ialah menyangkut kedudukan dan peranan tokoh Diponegoro dalam perspektif proses perjuangan pembentukan kesatuan nasion Indonesia. Secara luas wawasan pendekatan semacam itu juga penting artinya dalam menjelaskan berbagai segi lain yang berkaitan dengan masalah tentang latar sejarah (*historical setting*), kausalitas, proses, kedudukan (*position*), peranan (*role*), makna (*meaning*) dan bobot aksi dan partisipasi (*action and participation capacity*), kepemimpinan (*leadership*) dan kepahlawanan (*Hero*), dalam hal ini yang dimiliki Diponegoro.

Secara metodologis penggunaan perspektif sejarah yang mengacu pada integrasi nasion penting sekali artinya dalam proses formasi teoritis, karena dapat membantu dalam penyusunan kerangka konseptual, proses abstraksi, generalisasi dan formasi konstruksi teoritis yang dapat menerangkan gejala-gejala sejarah mana yang bersifat lokal dan mana yang

bersifat supra-lokal atau nasional. Dengan kerangka konseptual yang sama, juga akan dapat diterangkan pertanyaan mengenai perbuatan dan perilaku (pelaku) sejarah mana yang bermakna individual, subyektif, primordial, parokial dan etnis, dan tindakan dan perilaku mana yang dapat dipandang bermakna sebaliknya yaitu kolektif, obyektif, modern, supra-lokal dan nasion.

Dalam kaitan yang sama, kerangka konseptual di atas dengan demikian akan dapat menjelaskan sejauhmana peristiwa *Perang Diponegoro* dan peristiwa yang semacam lainnya (*Perang Padri*, 1821 — 1837; *Perang di Aceh*, 1873 — 1904, dan lain-lain) bersifat lokal dan sejauhmana bersifat supra-lokal atau "nasional".

Seperti halnya persoalan di atas, maka persoalan lainnya juga akan dapat diterangkan. Pertanyaan mengenai kapan seorang pelaku sejarah akan dipandang sebagai tokoh lokal, dan kapan seorang pelaku sejarah yang lain akan dapat dipandang sebagai tokoh sejarah nasional akan dapat diterangkan. Kerangka konseptual semacam itu menjadi penting dalam menjelaskan tentang bagaimana tokoh Diponegoro harus dipandang, dan demikian juga dengan tokoh-tokoh sejarah lainnya (Imam Bonjol, Teuku Umar, Si Singamangaraja dan lainnya).

Selanjutnya penempatan tokoh Diponegoro dalam perspektif interaksi sosio-kultural, dalam hubungan ini akan lebih memperluas wawasan penjelasan (*explanation*) tersebut di atas. Dengan menggunakan perspektif Interaksi Simbolik (*Symbolic Interaction*) dan Peranan (*Role perspective* atau *Theory*), berbagai jaringan hubungan antara kedudukan (*position/status*), peranan (*role*), harapan (*expectation*), situasi (*situation*) dan aksi (*action*) yang dimainkan oleh Diponegoro sebagai pelaku (*actor*) sejarah dapat diterangkan. Perspektif teoritis ini juga akan penting dalam mendasari penjelasan yang menyangkut dimensi tingkah-laku (*behaviour*), perilaku (*attitude*), peranan (*role*), dan dimensi-dimensi simbolis dan kultural dari kehidupan pelaku sejarah, terutama dalam mereaksi terhadap perubahan struktural dan kultural yang disebabkan oleh kekuatan indogen dan eksogen yang dalam hal ini telah menimbulkan pecahnya Perang Diponegoro pada tahun 1825 — 1830 di Jawa.

2. Latar Sejarah : Perang Diponegoro, 1825 — 1830

Pergantian masa dari abad ke 18 ke abad ke 19 di Indonesia ditandai dengan berbagai perubahan besar. Di satu pihak, terlihat adanya gejala perluasan kekuasaan politik Barat secara ekstensif dan intensif atas wilayah Indonesia, yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai pengganti pemerintahan, VOC. Di lain pihak, sebaliknya, terjadi kemerosotan kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional sebagai akibat penetrasi politik kolonial Belanda. Wilayah teritorial, otonomi kekuasaan, kekuatan

militer, sumber ekonomi, kawula, kemerdekaan dan kedaulatan kerajaan-kerajaan di berbagai daerah Indonesia menjadi semakin kecil, atau bahkan hilang seluruhnya karena jatuh ke tangan kekuasaan penjajah, yang berarti hapusnya suatu kerajaan. Ada pula kerajaan yang pada lahiriyah tampak seperti masih hidup, akan tetapi sebenarnya tidak lebih daripada sebuah boneka dari kekuasaan asing, karena sudah tidak memiliki kekuasaan dan kedaulatan yang berarti lagi.

Selain gejala di atas, terdapat pula gejala kemunduran kehidupan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat tanah jajahan sebagai akibat peningkatan proses ekstraksi ekonomis yang dibawa oleh penetrasi sistem ekonomi kapitalistis Barat. Gejala kemerosotan kekuasaan politik dan kemunduran kehidupan ekonomi tersebut telah menyebabkan timbulnya gejala ketidakpuasan, ketegangan, kekrisuhan, perpecahan dan pertentangan, serta pergolakan. Berbagai gejala yang tersebut di atas, hampir semuanya terdapat di lingkungan kerajaan Mataram di Jawa. Secara umum kerajaan Mataram mengalami kemunduran besar, semenjak mangkatnya Sultan Agung pada pertengahan abad ke 17. Sedikit demi sedikit wilayah Mataram di P. Jawa jatuh ke tangan Belanda, bersama dengan pusat sumber kekayaan ekonominya. Daerah kekuasaan Mataram di Jawa Barat, daerah pesisir utara Jawa, sejumlah daerah di Jawa Timur, yang semuanya merupakan daerah potensial, secara berangsur-angsur jatuh ke tangan VOC. Akibatnya pada akhir abad ke 18 dan awal abad ke 19 wilayah kerajaan Mataram menjadi sempit, dan hanya terpusat pada wilayah Yogyakarta dan Surakarta serta beberapa daerah sekitarnya yang kurang potensial. Sementara itu pusat pemerintahan kerajaan telah terpecah-pecah menjadi beberapa bagian, yaitu Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran dan Pakualaman kesemuanya sudah bukan merupakan kerajaan yang memiliki kemerdekaan dan kedaulatan yang penuh, melainkan merupakan pemerintahan "boneka" dari Belanda. Mengapa sampai terjadi kemerosotan yang demikian, tidak lain karena pengganti Sultan Agung umumnya lemah, suka berkompromi dengan pihak Belanda, tidak ada ketegaran untuk menentang kehadiran kekuasaan asing seperti pendahulunya. Terbagi-baginya kerajaan sering diawali dengan pertentangan dan pergolakan kekuasaan di antara para pamaris kerajaan. Karena itu kerajaan menjadi lemah, suram, kurang wibawa, banyak konflik, penuh intrik, persekongkelan, dan banyak perpecahan di antara golongan elite keraton yang berbeda-beda orientasi dan ideologinya. Suasana lingkungan kerajaan semacam itu sangat mendukung bagi terjadinya pergolakan.

Kekuasaan pemerintah Belanda atas istana dan wilayah kerajaan, di lain pihak, cenderung makin kuat dan terpusat. Kekuasaan Belanda tidak hanya sangat menentukan dalam pengangkatan dan penobatan raja, dan pengangkatan para pejabat kerajaan, akan tetapi juga dalam memasukkan unsur-unsur gaya kehidupan Barat ke lingkungan kerajaan, seperti dalam

segi-segi seremonial, etiket, tradisi pergaulan kemewahan dan adat-kebiasaan baru yang sering dianggap bertentangan dengan tradisi Jawa.

Di luar keraton, yaitu di daerah pedesaan, keadaan penduduk umumnya banyak mengalami hambatan dan kesulitan akibat dari berbagai penerapan sistem perekonomian yang cenderung membawa ekstraksi ekonomis seperti tersebut di atas. Berbagai sistem persewaan (*verpachtingren*), penarikan bea cukai, bea *toll* dan tindakan pemerasan yang menurut sumber banyak dilakukan oleh orang-orang Cina atau golongan sosial lain, telah menyulitkan dan memerosotkan kehidupan ekonomi rakyat kecil. Kemerossotan kehidupan masyarakat kecil tidak hanya dalam segi ekonomi saja, tetapi di sana-sini juga terdapat kemerossotan segi moral, sebagai akibat dari meningkatnya perjudian, pemadatan, peminuman minuman keras, pelacuran, dan perbanditan. Menurut tradisi lokal penyebab kemerossotan moral masyarakat tersebut sering dirujuk pada lima jenis penyakit sosial yang terkenal dengan sebutan *Ma Lima* (Jawa, *Main, Madon, Minum, Madat, dan Maling*). Sebenarnya gejala kemerossotan moral atau "demoralisasi" bukan hanya terjadi di kalangan *wong-cilik*, melainkan juga melanda pada golongan *priyayi*, termasuk sementara anggota bangsawan keraton.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa selama periode 1812 — 1825 telah timbul ketidakpuasan dan kekisruhan di Jawa sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas. Peningkatan campur tangan Barat dalam urusan keraton terasa, terutama di keraton Yogyakarta. Demikian juga konflik, intrik dan korupsi makin meluas. Sementara itu penyewaan tanah-tanah penduduk di Jawa Tengah oleh pengusaha Barat dan Cina untuk perkebunan tebu, kopi dan indigo juga makin bertambah luas, terutama di daerah tanah lungguh (*apanage*) milik para bangsawan karena kebutuhan keuangan. Sementara itu dalam tahun 1816 — 1824 di Yogyakarta tercatat banyak terjadi kasus pemerasan dan penyelewengan yang dilakukan oleh para penarik pajak dan bea *toll*, terutama dari orang-orang Cina. Gangguan keamanan, pencurian, perkecuan, perbanditan dan kejahatan merajalela di daerah Yogyakarta dan sekitarnya selama periode yang sama, sebagai akibat kesulitan perekonomian. Sementara itu para bangsawan banyak kehilangan tanah-tanah *apanage* dan pengurangan sumber kehidupan di samping banyak mendapat tekanan dari pihak Belanda. Keadaan semacam itu telah memasak situasi untuk meletusnya pergolakan. Pergolakan segera meletus, ketika seorang bangsawan terkemuka, Pangeran Diponegoro, yaitu putra tertua Sultan Hamengku Buwono III, melancarkan aksi penentangan terhadap campur tangan pemerintah Belanda terhadap keraton dan situasi korup di lingkungan punggawa keraton.

Pergolakan disulut dengan peristiwa bentrokan antara pengikut Diponegoro dengan pasukan keraton di bawah Patih Danurejo IV, musuh Diponegoro, sehubungan dengan pembuatan jalan yang menuju Tegalrejo,

tempat kediaman Diponegoro, pada sekitar bulan Mei 1825. Bentrokan itu segera meluas dan meningkatkan ketegangan dan situasi konflik, dan mencapai puncaknya pada tanggal 20 Juli 1825 dengan berkobarnya peperangan melawan Belanda oleh Diponegoro di Tegalrejo. Pertempuran meletus pertama-tama di Tegalrejo, dan segera meluas secara cepat ke berbagai wilayah Yogyakarta dan Surakarta, serta daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diponegoro dan pasukannya segera keluar dari Tegalrejo untuk mengobarkan peperangan melawan Belanda dan kaki tangannya. Demikianlah awal pecahnya Perang Jawa yang berlangsung sejak tahun 1825 hingga tahun 1830.

Perlawanan Diponegoro mendapat sambutan luas dari berbagai pihak, baik dari kalangan rakyat pedesaan maupun para golongan bangsawan, pejabat, ulama, dan para pemuka rakyat lainnya. Dari 29 orang bangsawan terkemuka yang ada di keraton Yogyakarta, 15 di antaranya bergabung dengan Diponegoro. Selain itu 41 orang dari 88 orang Bupati senior, juga mendukung Diponegoro. Demikian pula para ulama dan kyai serta para santrinya di lingkungan pesantren ikut menjadi tulang punggungnya, terutama tokoh ulama terkemuka Kyai Maja. Dukungan terhadap Diponegoro dapat dibuktikan pula dari luasnya peta daerah pertempuran. Apabila diperhatikan medan pertempuran menyebar secara luas, tidak hanya di daerah pusat Yogyakarta — Surakarta, akan tetapi juga terjadi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Kedu, Banyumas, Pekalongan, Semarang, Pati, Bojonegoro, Madiun, Kediri dan daerah sekitarnya. Peristiwa, medan dan jalannya pertempuran yang terjadi selama pecahnya perang Diponegoro, kiranya cukup dapat diikuti dalam berbagai sumber historiografi perang Diponegoro, baik dari sumber Belanda maupun sumber lokal. Cukup disebut di sini dari sumber Belanda, misalnya, karya penting Louw dan Klerck (6 jilid), Ridder de Stuers, Weitzel, Hageman, di samping karya-karya lainnya termasuk tulisan Johan Fabricius. Sumber lokal, kiranya cukup banyak, terutama berupa karya *Babad*, baik yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri sewaktu di pengasingan maupun yang ditulis oleh penulis lainnya, yang mencakup golongan yang pro dan kontra terhadap perang Diponegoro.

Peperangan berakhir ketika Pangeran Diponegoro terkecoh ke dalam meja perundingan di Magelang pada bulan Mei 1830, karena perundingan yang direncanakan pihak Belanda hanyalah dipakai sebagai perangkap untuk menangkapnya. Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Menado, dan kemudian dipindahkan ke Makassar sampai akhir hayatnya (8 Januari 1855).

Perang Diponegoro yang ditujukan kepada Belanda dan keraton cukup banyak membawa korban dan biaya yang tidak sedikit bagi pihak Belanda. Menurut sumber tidak kurang dari 8000 pasukan Eropa dan 7000 pasukan bumiputra meninggal, dan menghabiskan biaya tidak kurang dari 20 juta *gulden*. Demikian juga korban yang jatuh di pihak pasukan

Diponegoro tidak terhitung jumlahnya. Menurut sementara sumber disebutkan bahwa tidak kurang dari 200.000 orang Jawa meninggal, dan hampir separoh penduduk Yogyakarta hilang.

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa Perang Diponegoro termasuk perang besar menurut ukuran jamannya, dan cukup besar pengaruhnya dalam kehidupan nasional pemerintah Belanda pada waktu itu. Bagi pemerintah Belanda Perang Diponegoro merupakan peperangan yang telah mengerahkan dana dan kekuatan militer secara besar-besaran. Perang itu tidak hanya telah melibatkan hampir seluruh kekuatan militer Belanda yang ada di Indonesia, tetapi juga telah menghabiskan dana keuangan yang tidak sedikit, yang kemudian menjadikan penyebab kemerosotan keuangan pemerintah Belanda pada periode itu. Mengapa Sistem Tanam Paksa (*Kultuurstelsel*) kemudian diterapkan pada masa sesudah Perang Diponegoro selesai, alasannya antara lain adalah untuk memperbaiki kebobrokan kas negara akibat banyak membiayai peperangan.

3. Hakekat Perang Diponegoro

Sekalipun Perang Diponegoro relatif berlangsung singkat, yaitu dalam tahun 1825 — 1830, akan tetapi memiliki makna yang luas. Secara politik peperangan Diponegoro merupakan manifestasi dari sikap penentangan dari kekuatan lokal terhadap kekuasaan Barat yang datang dari luar dan bersifat raksasa (*massive*), internasional, terorganisir rapi, dan lebih maju. Kehadiran kekuasaan Barat di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara pada umumnya, dapat dipandang sebagai kekuatan eksogen dan arus besar (*mainstreams*) yang mengancam eksistensi kemerdekaan dan kedaulatan politik negara tradisional di daerah-daerah Indonesia. Ancaman kekuasaan Barat semacam ini sejak dini telah disadari oleh Sultan Agung pada abad ke 17. Akibat kekuasaan dari Barat memang telah terbukti membawa proses disintegrasi bagi kekuatan-kekuatan politik, sosial, dan kultural masyarakat di lingkungan kerajaan Jawa. Karena itu Perang Diponegoro pada dasarnya merupakan pencerminan reaksi terhadap kekuasaan eksogen yang bersifat destruktif dan disintegratif.

Diponegoro dan para pendampingnya pada umumnya sadar akan ancaman bahaya destruktif yang datang dari kekuasaan kolonial Belanda, karena itu gerakan perlawanannya juga bercorak sebagai gerakan protes yang dijiwai dengan semangat *anti-kolonial*.

Di sisi lain peperangan ini juga menggambarkan suatu reaksi terhadap golongan penguasa kraton yang telah mantap, tetapi tidak memiliki tanggungjawab sosial dan bertindak sewenang-wenang. Maka dari itu peperangan Diponegoro juga cenderung bersifat anti-birokrat dan anti-kraton.

Sangat besar dukungan kalangan petani dan golongan bawah yang tertindas dan terperas terhadap peperangan ini. Karena itu semangat peperangan ini juga dijiwai dengan nafas pencarian keadilan dan perlindungan. Justru dari kalangan ini Diponegoro mampu memobilisasi kekuatan pasukan dan logistik yang menentukan kelancaran peperangan secara terbuka ataupun secara gerilya. Gelar "Ratu Adil" yang melekat pada Diponegoro selama perang, pada dasarnya berkaitan dengan masa pendukungnya yang sebagian besar dari kalangan bawah yang tertindas. Golongan semacam ini yang memimpikan untuk memperoleh keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan, menjadi pendukung pokok terhadap kepercayaan mitis-simbolis akan kehadiran "Juru Selamat" yang dilambangkan pada tokoh Diponegoro.

Pergolakan yang dilancarkan oleh Diponegoro dan pengikutnya pada dasarnya juga ditujukan untuk menentang eksekutif yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan struktural dan kultural sebagai akibat penetrasi kekuasaan Barat yang membawa kemerosotan moral, baik di kalangan bangsawan kraton maupun masyarakat umumnya. Karena itu satu sisi dari gerakan perlawanan ini bercorak sebagai gerakan anti-kemerosotan moral, dan anti-kultur Barat. Maka dari itu gerakan peperangan yang dilancarkan Diponegoro dapat juga disebut sebagai "gerakan-kebudayaan-tandingan" (*counter-culture movement*). Inti dari gerakan ini antara lain hendak menangkal budaya Barat, dan hendak melestarikan inti kebudayaan Jawa sebagai sumber kekuatan untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis.

Salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari perang ini ialah unsur agama Islam. Peperangan tidak hanya didukung secara fisik oleh kekuatan golongan ulama, kyai dan para santri dari kalangan pesantren, akan tetapi juga didukung oleh moral dan ideologi ajaran Islam. Malah semangat dan ideologi Islam menduduki tempat penting dalam proses pembentukan organisasi dan mobilisasi pendukung perjuangan Diponegoro. Ideologi "Perang-Sabil" dan "Jihad fi sabilillah" serta semboyan "Anti-Kafir" terdapat dalam faset-faset perjuangan Diponegoro selama itu. Dengan demikian salah satu sisi perjuangan Diponegoro pada dasarnya memiliki sisi perjuangan keagamaan. Dalam hubungan ini relevan apabila Michael Adas menyebut Diponegoro sebagai *Prophets of Rebellion* ("Nabi Pemberontakan").

Dengan demikian Perang-Diponegoro dapat dipandang sebagai peperangan yang memiliki dimensi banyak, dan bersekala nasional. Karena itu corak peperangan cenderung bersifat total, mencakup keseluruhan hakekat kehidupan dan daerah dukung luas, serta pengaruh yang jauh. Gerakan peperangan Diponegoro memang bersifat tradisional dan konservatif karena tidak dapat lepas dari situasi zamannya, sehingga tidak mampu menghadapi pihak lawan yang telah lebih maju. Hal ini merupakan salah satu ciri dari kelemahan corak perjuangan dari masa tradisional.

4. Pangeran Diponegoro : Kepemimpinan dan Kepahlawanan

Penyorotan kepemimpinan atau kepahlawanan tokoh Diponegoro pada dasarnya adalah penyorotan tentang aktualisasi tokoh sejarah dalam realitas kehidupan masa lampunya. Kepemimpinan dan kepahlawanan pada dasarnya adalah suatu bentuk kualitas kepribadian individu yang memiliki makna dalam hubungan kehidupan kolektif. Sebagai bagian dari kualitas diri pelaku sejarah kepemimpinan merupakan ekspresi simbolis dari aktualisasi respons integratif terhadap tantangan lingkungan kehidupan pada jamannya. Ideologi, perspektif dan orientasi pemikiran yang mendasari sang pelaku sejarah diperoleh dari hasil proses interaksi sosial di lingkungan jamannya.

Kelahiran kepemimpinan dan kepahlawanan dengan demikian lekat dengan kondisi lingkungan struktural dan kultural masyarakat dan jaman-nya. Unsur-unsur kepribadian yang sarwa terkemuka, utama dan bagus (*primacy, primus, elite*), sarwa sadar dan memiliki tanggung jawab sosial tinggi, serta berjiwa besar dan memiliki daya nalar yang jauh adalah unsur-unsur kepribadian yang mendasari terbentuknya orang terkemuka, pemimpin atau orang besar. Menurut Oswald Spengler "orang besar" (*the great man*) atau "pahlawan" (*hero*) adalah "Jiwa Jamannya" (*the Spirit of his time*), atau "Sukma Kebudayaan-nya" (*the "Soul" of his culture*). Maksud-nya tokoh "orang besar" dan "pahlawan" tidak lain adalah "jati-diri", "Jiwa" atau "inti" dari masyarakat, kebudayaan dan jaman yang menjadi tempat sang pahlawan dan pemimpin dilahirkan dan berkarya.

Kelahiran pahlawan dan pemimpin tidak dengan sendirinya atau semata-mata atas pilihannya sendiri. Akan tetapi dalam batas-batas tertentu kelahiran kepemimpinan dan kepahlawanan juga ditentukan oleh tuntutan dan keharusan (*necessity*) dari masyarakat, kebudayaan dan jaman-nya. Kebutuhan jaman (*needs of the period*) yang mengharuskan kelahiran kepemimpinan atau kepahlawanan dapat berbeda-beda, baik sifat maupun bentuknya, yaitu metafisikal (*metaphysical*), ideal, kultural, politik dan ekonomis. Demikian pula menurut tipologinya bermacam-macam, dan apabila meminjam tipologi Weber, maka akan dapat dibedakan antara tipe tradisional, charismatic dan yang legal-rasional.

Dari keterangan di atas, maka dapat dikemukakan, bahwa tuntutan masyarakat dan jamannya telah menempatkan Diponegoro sebagai tokoh "pemimpin", "pahlawan" dan "orang besar" pada jamannya. Sesuai dengan kedudukannya Diponegoro telah memainkan peranan sebagai "anak jaman", "juru bicara" dan "pejuang" masyarakat dan kebudayaannya untuk membela kemerdekaan, kedaulatan, keadilan, kepribadian, kehidupan dan agama. Sebagai anak jamannya ia telah mengintegrasikan dirinya dengan tuntutan masyarakatnya. Diponegoro telah mampu menghadapi lingkungan masyarakat pada jamannya secara kritis dan mampu menginterpretasikan situasi jamannya secara tepat, serta

mampu mengaktualisasikan gagasan dan pikirannya dalam bentuk perbuatan dan aksi-aksi perjuangannya. Dengan kata lain Diponegoro telah berpikir, berbuat dan berkorban. Apabila disimak hampir seluruh hidupnya diabdikan untuk perjuangan yang diyakininya. Akhir hayatnya yang dihabiskan di pembuangan menegaskan Diponegoro merupakan pemimpin dan pahlawan sejati.

Inti kepemimpinan Diponegoro pada dasarnya sejajar dengan hakekat dari perjuangannya. Pertama, wawasan kepemimpinannya yang mengutamakan kemerdekaan dan kebebasan, tercermin dari corak perjuangannya yang bersifat anti-kolonial dan anti-kraton. Kedua, sikapnya yang mengutamakan kejujuran, tercermin dari sifat perjuangannya yang bersifat anti kebatilan dan kejahatan di lingkungan kraton. Ketiga, sikap kepribadiannya yang mengutamakan kemandirian dan percaya kepada diri sendiri, yang tercermin dari sikap hidupnya yang melepaskan diri dari ikatan istana dan tinggal di luar kraton. Keempat, sikap merakyat dan melindungi yang lemah, tercermin dari kediamannya yang ada di tengah-tengah rakyat biasa, dan juga berjuang untuk pembebasan penderitaan rakyat. Kelima, sikap berani dan memiliki pendirian yang teguh. Keenam, sikap hidup dan perjuangannya yang bersifat religious. Ketujuh, kepribadian kepemimpinannya yang berakar kepada kebudayaan masyarakatnya.

Secara simbolis semangat dan jiwa kepemimpinan Diponegoro pada dasarnya juga dapat dilacak dari makna gelar-gelar yang dipakai selama peperangan. Beberapa gelar yang penting antara lain sebagai berikut. Pertama, gelar Diponegoro yang berbunyi : "*Sultan Ngabdulkamit Erucakra Sayidin Panatagama Kalifat Rasulallah Sain*" (sic!). Kedua, "*Sultan Ngabdulkamit Erucakra Kabirulmukminina Kalifatul Rasulallah Hamengkubuwana Senapati Ingalaga sabilullah ing Tanah Jawa*". Yang pertama dapat ditafsirkan bahwa Sultan Ngabdulkamit adalah Ratu Adil (Erucakra), Pemuka dan Pembina Agama, dan Khalifat utusan Allah. Yang kedua kira-kira berarti, bahwa Sultan Ngabdulkamit, adalah Ratu Adil, golongan mukmin, Khalifat dan utusan Allah, Hamengkubuwana, Panglima Perang Sabil di Jawa. Apabila nama dan gelar seorang tokoh dapat diinterpretasikan sebagai ekspresi simbolis dari persepsi, orientasi, ekspektasi, dan konsepsi diri terhadap nilai (*values*), norma, dan pandangan dunia (*World-view*) yang diyakininya, maka dari nama dan gelar Diponegoro tersebut pada dasarnya dapat disarikan jatidiri kepemimpinannya yang berorientasi kepada keadilan, Ketuhanan, keimanan dan ketakwaan, keluhuran dan kebesaran jiwa (Hamengkubuwana), kepemimpinan religious (Khalifah), semangat "jihad" (memerangi kebatilan dan kejahatan demi menegakkan kebenaran di jalan Allah), dan patriotisme.

5. Penutup

Pangeran Aryo Diponegoro (1785 — 1855) adalah seorang tokoh pemimpin, pejuang dan pahlawan dalam Perang Jawa (1825 — 1830). Ia dilahirkan sebagai seorang bangsawan kraton Yogyakarta, yaitu putra tertua Sultan Hamengkubuwono III, dan seorang muslim yang sekaligus juga seorang patriot Jawa. Diponegoro memiliki pengalaman pribadi yang dalam, baik dalam pengalaman keagamaan maupun kehidupan, yang mungkin mendasari sikapnya yang kritis terhadap lingkungan sekitarnya dan jamannya. Proses dialog antara dirinya dengan lingkungan sosial dan kulturalnya telah melahirkan kesadaran dan kearifan pribadinya dalam menghadapi perubahan-perubahan yang sedang terjadi di sekitarnya. Penetrasi kekuasaan kolonial dan dampaknya terhadap kemerosotan sosial dan kultural masyarakatnya ditanggapi secara positif dan integratif. Ia berani menentang arus besar yang sedang melanda dalam daerah Indonesia, dengan melancarkan protes, penentangan dan peperangan yang harus ditebusnya dengan segala pengorbanan jiwa dan raganya. Sikap dan perbuatannya yang demikian itu hanya ada pada seorang yang berjiwa besar dan berjiwa pahlawan. Keputusannya untuk mengobarkan peperangan yang cukup memakan waktu hanyalah mungkin terjadi pada orang yang memiliki jiwa pemimpin, yaitu berani dan bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang dipikirkan dan dikatakannya. Karena sikap dan perbuatannya yang demikian itulah Diponegoro memiliki tempat penting dalam masyarakatnya.

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa perang Diponegoro adalah perang melawan arus besar pemerintahan kolonial Belanda, yaitu musuh dari semua rakyat di wilayah Indonesia. Perang Diponegoro memiliki dimensi nasional, di atas dimensi lokal. Demikian juga tokoh Diponegoro memiliki dimensi nasional, di samping tokoh yang memiliki dimensi lokal.

Dalam proses sejarah pembentukan nasion Indonesia, perang Diponegoro memiliki tempat sebagai salah satu unsur dinamis dari masyarakat Indonesia. Nilai kepemimpinan dan kepahlawanan Diponegoro masih relevan untuk dipakai secara pragmatis dalam pembinaan kesadaran nasional, cinta tanah air dan dalam pembinaan sosok kepemimpinan di masa datang.

Daftar Pustaka

- Adas, Michael, *Prophets of Rebellion, Millenarian Protest Movements against the European Colonial Order*. Cambridge, London etc.: Cambridge University Press, 1987.
- Carey, PBR., "Javanese Histories of Dipanegara : The Buku Kedhung Kebo, Its Authorship and Historical importance". *BKI*, 130 (19874), hlm. 259 — 288.
- Fabricious, Johan, *Dipanegara (De Java-Oorlog van 1825 tot 1830)*. Den Haag: Leopold, 1976.
- Hageman, J., *Geschiedenis van den oorlog op Java van 1825 tot 1830*. Batavia, 1856.
- Kemp, P.H. van der, "Dipanegara, een geschiedkundig Hamlet type", *BKI*, XLVI (1896) hlm. 201 —
- Low, P.J. F., dan E.S. de Klerck, *De Java Oorlog van 1825 — 1830*. 6 jilid, s'Hage: M. Nijhoff, 1889.
- Ricklefs, M.C., "Dipanegara's Early Inspirational Experience". *BKI*, 130 (1974), hlm. 227 — 258.
- Turner, Jonathan H., *The Structure of Sociological Theory*. Georgetown, Ontario; Irwin-Dorsey Ltd., 1978.